



Legislatif Minta Pemkot Hentikan Kebijakan Tambal Sulam

Komisi B DPRD Kota Jogja menyoroti belum selesainya permasalahan sampah mendekati akhir tahun ini. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mencoreng citra pariwisata. Terlebih, sebentar lagi sudah memasuki musim libur panjang Nataru.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Jogja Munazar mengatakan, daya tarik Jogjakarta sebagai kota budaya dan pariwisata kini tengah terancam oleh krisis darurat sampah. Hal itu tampak dari tumpukan pada berbagai depo. Seperti Lempuyangan, Suryowijayan, Nitikan, Mandala Krida, hingga Giwangan.

Munazar menyebut, fenomena itu tentu tidak hanya mengganggu estetika kota. Namun juga menjadi wajah retak pariwisata. Karena bau menyengat yang timbul dari tumpukan sampah akan berdampak pada kesehatan warga dan kenyamanan wisatawan.

"Persoalan ini sebagai cermin kegagalan tata kelola yang sistemik, bukan sekadar masalah teknis musiman," ujar Munazar kepada *Radar Jogja*, kemarin (20/11).

Politisi Partai Golkar ini menekankan, Pemkot seharusnya tidak hanya berfokus pada penanganan sampah. Namun juga mulai memperbaiki sistem pengelolaan dan perencanaan kota. Sebab jika tidak ada solusi yang berkelanjutan, sampah dinilai akan men-

jadi masalah serupa yang terus berulang. Terlebih kini Kota Jogja juga dihadapkan fakta bahwa TPST Piyungan sudah dalam kondisi *overload*. Serta akan dihentikan operasionalnya pada 2026 mendatang.

Karena itu, Munazar berharap Pemkot berhenti dengan kebijakan tambal sulam. Namun harus segera beralih ke sistem pengelolaan yang lebih desentralisasi. Termasuk belajar dari model tempat pengolahan sampah *reduce, reuse, recycle* (TPS3R) yang sukses diterapkan di kota-kota lain.

Di samping itu, dia juga mendorong agar Pemkot bisa lebih masif dalam hal sosialisasi pemilahan sampah di masyarakat. Sebab kesadaran kolektif masyarakat merupakan salah satu solusi mengatasi darurat sampah. "Pengelolaan sampah harus dimulai dari tingkat terkecil, RT, RW, atau kelurahan, dengan melibatkan partisipasi aktif warga," tegas Munazar.

Sementara itu, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo optimistis, kuota yang diberikan oleh Pemprov dapat mengantisipasi membludaknya depo. Apalagi di tengah melonjaknya jumlah kunjungan wisatawan selama masa libur panjang. "Sampai Desember kami akan memanfaatkan kuota 1.500 ton, supaya nanti pas Nataru itu (depo) kami juga longgar," bebarnya. (*inu/wia/fj*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005